

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KEPENGHULUAN MUMUGO KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Lilis Wahyuni¹, E. Maznah Hijeriah², Mutiara Rejeki³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai

Telp: 08127520390

E-mail: liliswahyuni6@gmail.com

Kata Kunci

Partisipasi
Partisipasi masyarakat
pembangunan

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pembangunan di kepenghuluan, karena dalam pembangunan diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Apabila hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka tujuan dari pembangunan itu tidak akan tercapai secara optimal. Teori yang digunakan adalah menurut Yadav dalam Theresia dkk (2014:198) yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Kepenghuluan sebanyak 16 orang, Lembaga Kepenghuluan sebanyak 33 orang dan Masyarakat sebanyak 68 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Sampling Jenuh* untuk Perangkat Kepenghuluan dan lembaga kepenghuluan, sedangkan teknik *Cluster Sampling/Area Sampling* untuk masyarakat. Jenis data dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Angket dan Wawancara. Dan analisa data menggunakan penganalisaan *Statistik Deskriptif* dan pengukuran data Skala *Likert*. Hasil penelitian berada pada kategori Cukup Baik dengan skor 3028 (71,89%). Faktor pendukung yaitu adanya partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, sedangkan faktor penghambat masih kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan masih kurangnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

1. Pendahuluan

Pada hakekatnya tujuan dari pembangunan yaitu untuk mensejahterakan seluruh masyarakat (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022c). Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk memajukan kesajahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan tujuan utama dari pembangunan bangsa Indonesia. Demi tercapainya pembangunan yang merata (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022a), pemerintah selaku penyelenggara pembangunan diharapkan dapat menggali potensi yang ada, kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin (Wahyuni, 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa perlu ditumbuhkan partisipasi tersebut dan memerlukan seseorang yang mampu memimpin (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022f), mengajak dan membawa masyarakat agar berjalannya kegiatan pembangunan di Desa disebut dengan Kepala Desa (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022e). Dalam hal ini fungsi Kepala Desa memegang peranan penting (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022d). Seorang Kepala Desa peranan penting yang sangat menentukan berhasil atau tidak pembangunan Desa yang dipimpinnya (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani,

2022g). Sehingga Kepala Desa memiliki tugas berat dalam mengajak (Theovanni Yolanda Evelin, 2020), menggerakkan, mengarahkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan (Lilis Wahyuni, 2022).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat 1 menyatakan: Desa adalah desa dan desa adat dan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pada pasal 1 butir 2 mengatakan Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa.

Kepenghuluan Mumugo merupakan salah satu Kenghuluan yang berada di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Pada tanggal 18

Juli 2007 dilakukan peresmian Kepenghuluan persiapan Mumugo Kecamatan Tanah Putih, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2009 terbentuklah secara definitif Kepenghuluan Mumugo.

Partisipasi masyarakat diperlukan pada tahap awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022b), dimana bantuan anggaran dana desa yang diberikan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk Kepenghuluan Mumugo bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan kepenghuluan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hanya sebagai pembimbing, mengawasi dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Kepentingan partisipasi masyarakat diperlukan pada saat pelaksanaan pembangunan (Hildawati, 2020), tidak terlepas dari bantuan kepenghuluan yang diberikan Kabupaten Rokan Hilir bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong dalam pembangunan kepenghuluan, pembangunan kepenghuluan yang menjadi penekan utama adalah prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi masyarakat yang menjadi kunci utama terlaksananya pembangunan Kepenghuluan. Pemerintah hanya sebagai pembimbing, mengawasi dan memberikan dorongan masyarakat untuk memelihara (Variza Aditya Muhalida Zia Ibhara, 2022), menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa masyarakat (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022e), agar berjalannya kegiatan pembangunan di kepenghuluan maka diperlukan peranan seorang pemimpin yang disebut dengan Penghulu.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dana kepenghuluan dan alokasi dana kepenghuluan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1
Dana Kepenghuluan dan Alokasi Dana
Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir

Tahun	Dana Kepenghuluan	Alokasi Dana Kepenghuluan
2019	Rp. 832,542,000	Rp.1,036,556,873.
2020	Rp. 797,333,000	Rp.1,526,179,514
2021	Rp. 805,896,000	Rp.1.498.354.932

Sumber data: Kantor Kepenghuluan Mumugo 2021

Tabel I.1 diatas merupakan dana kepenghuluan dan alokasi dana kepenghuluan untuk pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa alokasi dana kepenghuluan berjumlah satu milyar pertahun, melalui dana tersebut bisa dijadikan wadah koordinasi dan komunikasi bagi pemerintahan kepenghuluan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, sebagai tolak ukur penilaian pencapaian kinerja pemerintahan kepenghuluan atas target pembangunan yang akan dicapai (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022e).

Agar pembangunan kepenghuluan tercapai dengan tujuan dan harapan (Hildawati & Suri, 2020), maka diperlukan penghulu memberikan pengertian kepada masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam pembangunan di Kepenghuluan Mumugo dalam memberikan masukan, ide atau gagasan tentang pembangunan apa saja yang di perlukan, serta mengembangkan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan di Kepenghuluan Mumugo. Untuk melihat partisipasi masyarakat setiap tahun dalam pembangunan terlihat melalui kegiatan musrenbang yang melibatkan masyarakat dan lembaga yang ada untuk berpartisipasi (E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, 2022h). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
Kehadiran Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) di Kepenghuluan Mumugo
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

No	Utusan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Undang (Orang)	Hadir (Orang)	Undang (Orang)	Hadir (Orang)	Undang (Orang)	Hadir (Orang)
1	Pengulu	1	1	1	1	1	1
2	Perangkat Desa	14	13	14	14	14	14
3	BPkep	5	4	5	3	5	4
4	LPM	14	3	14	3	14	2
5	Kepala Dusun	2	1	2	2	2	2
6	Ketua RW	4	2	4	2	4	3
7	Ketua RT	10	6	10	5	10	7
8	Kader PKK	5	1	5	2	5	-
9	Masyarakat	15	10	15	8	15	5
	Jumlah	70	41	70	40	70	38

Sumber data: Kantor Kepenghuluan Mumugo 2021

Dari tabel I.2 diatas terlihat partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang terbilang cukup rendah hal ini meyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemberian ide atau masukan-masukan informasi untuk pembangunan kepenghuluan, padahal dalam kegiatan musrenbang itu peran masyarakat sangat penting untuk perkembangan terhadap pembangunan. Adanya kesibukan lain dan kurangnya kesadaran masyarakat

dalam menyumbangkan pemikiran/ide-ide bagi pembangunan dan masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembangunan. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi pencapaian terhadap aspirasi masyarakat akan kebutuhan pembangunan demi kemajuan di wilayahnya (Anisa et al., 2022).

Selanjutnya untuk melihat pemanfaatan hasil pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Pemanfaatan Hasil Pembangunan Prasarana di
Kepenghuluan
Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir

No	Jenis Pembangunan	Berdiri	Fungsi	Dimanfaatkan		Kondisi	
				Ya	Tidak	Baik	Tidak Baik
1	Pasar	2015	Sebagai Tempat Jual Beli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pustu	2016	Sebagai tempat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Poskamling	2018	POS Keamanan dan Ketertiban	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Kantor Penghulu	2016	Pusat pelayanan di kepenghuluan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Rumah Dinas Dokter	2016	Rumah untuk dokter yang bekerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	MPA (Masyarakat Peduli Api)	2016	Markas untuk memadamkan api bila terjadi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber data: Kantor Kepenghuluan Mumugo 2021

Berdasarkan tabel I.3 menunjukkan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun di Kepenghuluan Mumugo tidak dimanfaatkan sehingga menjadi bangunan kosong dan ada beberapa bangunan menjadi terbengkalai. Hal ini disebabkan karena kurang kesadaran dari masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan dan juga kesalahan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan pembangunan yang tidak digunakan masyarakat terdapat bangunan pasar yang kondisinya masih bagus tetapi tidak dimanfaatkan yang di bangun pada tahun 2015, seharusnya pasar ini bisa digunakan tiap minggunya tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk transaksi jual beli dan bangunan-bangunan yang terbengkalai seperti kantor kepenghuluan, pustu dan rumah dinas dokter yang dibangun pada tahun 2016 dapat kita lihat kondisi bangunan-bangunan ini sudah tidak layak pakai lagi, sudah di penuh semak belukar dan kondisi rusak.

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian diatas maka penulis memiliki suatu keinginan untuk mengupas lebih dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sehingga penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu: **"Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir"**

2. Metodologi

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ini terletak di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dipilih dan ditetapkannya Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ini sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan dan alasan karena berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis mendapatkan informasi bahwa masih kurang partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, ide atau masukan dalam musyawarah rencana pembangunan, selain itu masih kurang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang ada.

B. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:90) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya Menurut Sugiyono (2017:91) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Desa dan Masyarakat yang ada di Kepenghuluan Mumugo yaitu: Penghulu/Kepala Desa, Sekretaris Penghulu, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan

(BPKep), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kaur, Kasi, Staf, Kepala Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), serta Kepala Keluarga yang ada pada 2 Dusun di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Perangkat Kepenghuluan Penulis menggunakan cara pengambilan teknik *Sampling Jenuh*. Menurut Sugiyono (2017:96) teknik *Sampling Jenuh* adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Selanjutnya untuk masyarakat pengambilan sampel menggunakan teknik *Cluster Sampling/Area*

Sampling (Sugiyono, 2017:94), yaitu suatu teknik sampling daerah yang digunakan dengan 2 tahap, tahap satu dengan menentukan sampel daerah dan tahap kedua dengan menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Untuk sampel masyarakat maka penulis menetapkan 15% responden setiap dusun yang berjumlah 2 Dusun dari jumlah populasi karena dianggap mewakili jumlah Kepala Keluarga Dusun yang ada di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Menurut Soewadji (2014:147) data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Dari pengertian diatas, maka penulis mengambil berupa data yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun data yang dimaksud berhubungan dengan:

- Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
- Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
- Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

2. Data Sekunder

Menurut Soewadji (2014:147) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk dapat menjawab, diperlukan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber dipercaya dan tanggung jawabkan. Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi yang dilakukan terdiri dari Observasi, Kuesioner, wawancara.

E. Analisa Data

Pelaksanaan penganalisaan data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan skala linkert .

Untuk mengetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasarkan perhitungan berikut :

1. Pengukuran untuk setiap indikator

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 117 orang dengan 3 pernyataan. Kategori terhadap setiap indikator ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lindetal dalam Zulganef. Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan menghitung skor tertinggi dan terendah, sebagai berikut :

Skor tertinggi: $3 \times 3 \times 117 = 1053$

Skor terendah: $1 \times 2 \times 117 = 351$

2. Pengukuran untuk variabel penelitian

Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 117 orang, rencana pertanyaan yang akan diajukan sebanyak 12 pertanyaan. Selanjutnya untuk menentukan kategori penelitian terhadap variable penelitian maka di tentukan sebagai berikut:

Skor tertinggi: $3 \times 12 \times 117 = 4212$

Skor terendah: $1 \times 12 \times 117 = 1404$

3. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk dari keterlibatan dari masyarakat yang sangat diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya akan menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Partisipasi menuntut masyarakat untuk diberikan kesempatan dan keikutsertaan untuk berperan dalam proses- proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Hal yang sangat penting diharapkan pemerintah yaitu terutama sekali ketersediaan masyarakat dalam berperan secara aktif pada setiap proses pembangunan yang dilaksanakan, disamping itu adanya partisipasi masyarakat akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan nantinya dalam arti masyarakat lebih mengetahui akan kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi pemerintah.

Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti keaktifan waktu, tenaga dan dana serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka penyumbangan ide bagi kepentingan pembangunan. Sebaliknya apabila masyarakat tidak memiliki kesempatan secara personal karena sibuk oleh kegiatan individu, tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai/kategori pendidikan miskin serta pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka optimalisasi terhadap pembangunan akan rendah.

Perwujudan dari partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah strategi dan kebijakan kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan secara merata (Wahyuni & Shaliza, 2021). Partisipasi juga memberikan sumbangan dan turut serta menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai akan lebih ditekankan kepada hak dan kewajiban bagi setiap masyarakat di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Sehubung dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir, maka indikator penulis terdiri dari:

1) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan di kepenghuluan tidak hanya pemerintah kepenghuluan saja yang melakukan pengambilan keputusan oleh sebab itu dalam perencanaan pengambilan keputusan sangat dibutuhkan kehadiran dari masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan serta dalam memberikan ide-ide dan pemikiran dalam proses perencanaan pembangunan seperti dalam musyawarah rencana pembangunan kepenghuluan (musrenbangkep), yaitu diwakili oleh penghulu, perangkat kepenghuluan, lembaga kepenghuluan dan kemudian masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan penentuan alternatif untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat ini sangatlah penting karena masyarakat dituntut untuk ikut dalam menentukan orientasi pembangunan.

Untuk melihat partisipasi dalam pengambilan keputusan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari aspek berikut:

- a. Adanya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti rapat musrenbang yang diadakan di kepenghuluan. Artinya masyarakat berperan aktif dalam menyumbangkan pemikirannya baik dalam pengambilan keputusan khususnya dalam musyawarah rencana pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam rapat musrenbang. Maksudnya masyarakat menyampaikan ide-ide pemikiran, masukan, pendapat, saran dan kritikan yang membangun atau bermanfaat di dalam rapat yang diselenggarakan tidak hanya dilakukan oleh perangkat kepenghuluan, lembaga kepenghuluan dan tokoh-tokoh masyarakat saja melainkan harus ada keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan usulan.
- c. Adanya keterlibatan masyarakat untuk memberikan data atau informasi musrenbang. Artinya masyarakat mampu memberikan data atau informasi tentang pembangunan yang dibutuhkan warga sekitar yang diadakan pada setiap pertemuan musrenbang di Kepenghuluan Mumugo.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden mengenai partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

No	Sub Indikator	F/S	Kriteria Indikator			Jumlah
			B	CB	TB	
1	Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti rapat musrenbang yang diadakan di	Frek	20	68	29	117
		Skor	60	136	29	225
2	Keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam rapat tentang	Frek	14	74	29	117
		Skor	42	148	29	219
3	Keterlibatan masyarakat untuk memberikan data atau informasi	Frek	17	79	21	117
		Skor	51	158	21	230
Total		Frek	51	221	79	351
		Skor	153	442	79	674

Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2022

2) Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan suatu kontribusi masyarakat terhadap tindakan yang diberikan demi terciptanya kerjasama dan rasa solidaritas. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan merupakan bentuk dari kesadaran dan kepedulian masyarakat serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat diartikan sebagai memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, uang tunai, maupun berbentuk barang. Kesadaran partisipasi dari masyarakat tersebut yang akan menjadikan pemerintah Kepenghuluan Mumugo semakin maju terhadap pembangunan.

Untuk melihat partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari aspek berikut:

- a. Adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut bergotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan. Dapat dijelaskan bahwa perangkat kepenghuluan, lembaga kepenghuluan dan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan berupa sumbangan tenaga untuk bergotong-royong demi terwujudnya pembangunan yang diharapkan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Adanya keinginan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan. Artinya adanya keinginan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan untuk bersama-sama

memelihara hasil pembangunan.

- c. Adanya keinginan masyarakat untuk memberikan sumbangan berupa alat atau bahan dalam kegiatan pembangunan di Kepenghuluan. Artinya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat turut untuk memberikan sumbangan terhadap bangunan yang akan dibangun di Kepenghuluan Mumugo demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat di Kepenghuluan Mumugo.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden mengenai partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

No	Sub Indikator	Kriteria				Jumlah
		F/S	B	CB	TB	
1	Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan	Frek	63	54	0	117
		Skor	189	108	0	297
2	Keinginan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan	Frek	35	81	1	117
		Skor	105	162	1	268
3	Keinginan masyarakat untuk memberikan sumbangan berupa alat atau bahan dalam kegiatan pembangunan Kepenghuluan	Frek	42	74	1	117
		Skor	126	148	1	275
Total Skor		Frek	140	209	2	351
		Skor	420	418	2	840

Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2022

3) Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Artinya masyarakat, perangkat kepenghuluan dan lembaga kepenghuluan melakukan suatu kegiatan pengawasan atau evaluasi program terhadap proyek pembangunan yang sedang dilakukan. Pemantauan dan evaluasi pembangunan bertujuan agar pemerintah kepenghuluan diberikan koreksi dan masukkan dari masyarakat agar memperoleh umpan balik terhadap kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan pada Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk melihat partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dapat dilihat melalui aspek berikut:

- a. Adanya kegiatan evaluasi oleh penghulu, lembaga kepenghuluan dan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang ada di Kepenghuluan Mumugo. Artinya perangkat kepenghuluan, lembaga kepenghuluan dan masyarakat memantau langsung pembangunan

di kepenghuluan dilaksanakan tujuannya untuk mengetahui perkembangan terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

- b. Adanya keterlibatan penghulu, lembaga kepenghuluan dan masyarakat secara bersama-sama dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan selama proses pembangunan di kepenghuluan. Artinya adalah penghulu, lembaga kepenghuluan dan masyarakat harus mengetahui bagaimana tentang perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sedang dikerjakan hal ini bertujuan untuk mengetahui terhadap perkembangan pembangunan yang dilaksanakan untuk kemudian dimusyawarahkan.
- c. Adanya pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Artinya setiap perkembangan program pembangunan oleh kepenghuluan harus disampaikan kepada masyarakat di kepenghuluan dengan sedetail-detailnya baik secara musyawarah ataupun dengan cara keterbukaan informasi.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden mengenai partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

No	Sub Indikator	Kriteria Indikator				Jumlah
		F/S	B	CB	TB	
1	Kegiatan evaluasi oleh Penghulu, lembaga kepenghuluan dan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang ada di Kepenghuluan	Frek	42	72	3	117
		Skor	126	144	3	273
2	Keterlibatan Penghulu, lembaga kepenghuluan dan masyarakat secara bersama dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan selama proses pembangunan di Kepenghuluan	Frek	42	73	2	117
		Skor	126	146	2	274
3	Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan	Frek	56	59	2	117
		Skor	168	118	2	288
Total Skor		Frek	140	204	7	351
		Skor	420	408	7	835

Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2022

4) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pembangunan yang telah dilaksanakan tidak ada gunanya apabila tidak dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Sebaliknya apabila masyarakat dapat memanfaatkan pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah kepenghuluan maka pembangunan

itu akan dinilai berhasil. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sangat dibutuhkan dari kesadaran masyarakat agar pembangunan dapat terpelihara dan memiliki manfaat bagi masyarakat Kepenghuluan Mumugo. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat dilihat dari aspek berikut:

- Adanya masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan yang dilakukan di kepenghuluan. Artinya setiap hasil pembangunan yang telah dibangun semestinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, maka dari itu diperlukan kerjasama yang baik antara pengurus dan masyarakat itu sendiri.
- Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan yang sudah dibangun di kepenghuluan. Artinya hasil pembangunan harus dijaga dengan baik oleh masyarakat, masyarakat tidak merusak pembangunan yang telah dibangun di daerah tersebut.
- Adanya kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan seperti jalan ke penghuluan, pasar, posko dan lain sebagainya. Artinya masyarakat dapat mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan agar hasil pembangunan tidak sia-sia dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden mengenai partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

No	Sub Indikator	Kriteria Indikator				Jumlah
		F/S	B	CB	TB	
1	Masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan yang dilakukan di Kepenghuluan	Frek	22	59	36	117
		Skor	66	118	36	220
2	Kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan yang sudah dibangun di kepenghuluan	Frek	17	79	21	117
		Skor	51	158	21	230
3	Kesadaran masyarakat untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan seperti jalan kepenghuluan, pasar, posco dan lain sebagainya	Frek	15	82	20	117
		Skor	45	164	20	229
Total Skor		Frek	54	220	77	351
		Skor	162	440	77	679

Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2022

Berikut rekapitulasi jawaban responden

berdasarkan uraian 4 (empat) indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

No	Indikator	Kriteria Indikator				Jumlah
		F/S	B	CB	TB	
1	Partisipasi dalam pengambilan keputusan	F	51	221	79	351
		S	153	442	79	674
2	Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	F	140	209	2	351
		S	420	418	2	840
3	Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan	F	140	204	7	351
		S	420	408	7	835
4	Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan	F	54	220	77	351
		S	162	440	77	679
Total Skor		F	385	854	165	1404
		S	1155	1708	165	3028

Sumber Data: Hasil Olahan Lapangan, Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat diketahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada indikator pertama yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan frekuensi 351 dan skor 674. Indikator kedua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan frekuensi 351 dan skor 840, indikator ketiga yaitu partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dengan frekuensi 351 dan skor 835, dan indikator keempat yaitu Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dengan frekuensi 351 dan skor 679 .

Faktor Pendukung dan Penghambat Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Setelah melakukan penelitian terhadap Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalh sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dimana masyarakat di kepenghuluan dalam hal ini bersedia memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan, terdapatnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan bergotong royong untuk pembangunan Kepenghuluan Mumugo.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, dimana adanya peran penghulu, lembaga kepenghuluan dalam mengawasi secara langsung terhadap pembangunan di kepenghuluan, serta adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan Mumugo.

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam rapat tentang pembangunan, masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti musrenbang yang diadakan.
- b. Masih kurangnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan, masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan, serta rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan yang ada di Kepenghuluan Mumugo.

4. Kesimpulan

Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dikategorikan cukup baik. Kenyataan ini terbukti dari penelitian yang dilakukan terhadap 4 indikator yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dari 117 responden diperoleh total skor secara keseluruhan sebanyak 3028 (71,89%), berada pada kategori Cukup Baik karena berada pada interval 2341-3276

Faktor pendukung yang didapat adalah

partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian faktor pendukung yang kedua yaitu partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Sedangkan faktor penghambat yang didapat yaitu masih rendahnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian faktor penghambat yang kedua adalah masih rendahnya partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

5. Daftar Pustaka

BUKU

Dun, Willian 2000, Pengantar Analisa Kebijakan Publik, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Wasistiono Sadu, 2002, kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Focus Media, Bandung.

Wasistiono Sadu, 2003, Etika hubungan legislative eksekutif, Focus Media, Bandung.

JURNAL

Anisa, S., Erlianti, D., & Jannah, D. (2022). Analisis Asas Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. *JAPaBIS*, 4(1), 20–24.

<http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis/article/view/80>

E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022a). Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa Pada PDAM Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 6430–6443.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6500>

E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022b). Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa PT Federal International Finance (FIF Group) Cabang Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 6419–6429.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6499>

E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022c). Analisis Kualitas Pelayanan Pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 6023–6032.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6437>

E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022d). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Individu PT Sekato Pratama Makmur (SPM) Bukit Batu. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 2671–2683.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6471>

- E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022e). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penjualan Sepeda Motor Merek Yamaha CV. Prima Yamaha Nusantara Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 6444–6456. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6501>
- E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022f). Fungsi Kepemimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 2650–2662. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6466>
- E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022g). KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT . PERTAMINA RU II DUMAI COMMUNITY SATISFACTION WITH THE IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM OF PT . PERTAMINA RU II DUMAI (Corpo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 60–74.
- E. Maznah Hijeriah, Lili Suryani, L. K. (2022h). Kepuasan Pelanggan Hotel Comforta Dumai Variza. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 2663–2670. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6469>
- Hildawati, H. (2020). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelompok Nelayan Tuna Terhadap Program CSR PT Pertamina RU II Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, VI(2), 151–165. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5964](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5964)
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24–42. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4939](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4939)
- Lilis Wahyuni, E. (2022). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Upaya Melayani Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. *JAPaBIS*, 4(1), 1–5. <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis/article/view/77>
- Theovanni Yolanda Evelin, H. (2020). Dimensions of Service Quality in Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Dumai. *Kinerja*, 24(2), 241–245. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v24i2.2870>
- Variza Aditiya, Muhalida Zia Ibhara, N. A. N. (2022). Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Agung Automall Cabang Dumai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 5728–5743. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6390>
- Wahyuni, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. *JAPaBIS*, 4(1), 48–51. <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis/article/view/86>
- Wahyuni, L., & Shaliza, F. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Di Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai. *NIARA*, 14(2), 59–66. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/niara/article/view/6247>
- Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
- Peraturan Bupati sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang